

**ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2005-2013**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Disusun Oleh:
RISKA DWI ASTUTI
11404241036

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2005-2013**

**Oleh:
RISKA DWI ASTUTI
11404241036**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di depan
Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, Mei 2015

Pembimbing


Maimun Sholeh, M.Si

NIP. 19660606 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2005-2013**

**Disusun Oleh:
RISKA DWI ASTUTI
NIM 11404241036**

Telah dipertahankan di depan TIM Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada 4 Juni 2015 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Sukidjo, M.Pd	Ketua Penguji		22-6-2015
Maimun Sholeh, M.Si.	Sekretaris		23-6-2015
Mustofa, M.Sc.	Penguji Utama		22-6-2015

Yogyakarta, 23 Juni 2015
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19550328 198303 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riska Dwi Astuti

NIM : 11404241036

Jurusan : Pendidikan Ekonomi

Judul : Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah
Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Yogyakarta, Mei 2015

Yang menyatakan,



Riska Dwi Astuti

NIM. 11404241036

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi
sesamanya”

“Selalu mencari celah untuk bersyukur merupakan cara untuk
bahagia. Bersyukurlah dan berbahagialah.”
(Penulis)

“Jika yang saya lakukan sama dengan yang orang lain lakukan,
kenapa harus saya yang harus menjadi pemenang?”
(I Made Andi)

PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan skripsi ini untuk
Yogyakarta yang selalu istimewa dan
kepada orang tua saya,
Bapak Karjana dan Ibu Suwartilah
Semoga bermanfaat.*

**ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2005-2013**

**Oleh:
Riska Dwi Astuti
NIM. 11404241036**

ABSTRAK

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu masalah makroekonomi yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2005-2013.

Penelitian ini menganalisis 4 variabel bebas menggunakan data sekunder berupa data panel dengan *cross-section* 5 kabupaten/kota dan *time series* selama 9 tahun. Alat analisis yang digunakan berupa regresi data panel dengan metode *fixed effect*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, 2) PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dan 3) Populasi penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.

Kata kunci: ketimpangan, IPM, PDRB per kapita, Populasi penduduk

***ANALYSIS OF DETERMINANTS OF INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY
IN YOGYAKARTA SPECIAL TERRITORY IN THE PERIOD 2005-2013***

Riska Dwi Astuti

11404241036

ABSTRACT

The income distribution inequality is one of the macroeconomic problems related to the equal distribution of incomes among social strata. This study aimed to analyze factors affecting the income distribution inequality in Yogyakarta Special territory in the period 2005-2013. The study analyzed four independent variables using secondary data in the form of panel data with a cross-section in five regencies/cities and a time series of nine years. The analysis was regression with a fixed effect specification. The results of the study showed that: 1) natural resources did not have a significant effect on the income distribution inequality, 2) the human development index had a positive effect on the income distribution inequality, 3) the Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita had a negative effect on the income distribution inequality and 4) the population had a negative effect on the income distribution inequality in Yogyakarta Special Territory.

Keywords : income distribution inequality, HDI, GRDP per capita

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Alloh Subhanahu wata'ala, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan tuntunan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugiharsono, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Ibu Daru Wahyuni, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi, yang telah memberikan arahan dan kemudahan selama proses penyelesaian studi.
3. Bapak Maimun Sholeh, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar selalu memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Mustofa, M.Sc selaku narasumber yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama ini.
6. Sahabat-sahabatku, Indah Pratiwi, Hesty Febriani, Pitma Pertiwi, Arum Danarti Purnomo, Yayu Yulianti, Rodhiah, Novia, Alfi, Aji, Mbak Vivi dan semua personil *the iconers* angkatan 2011.

7. Sahabat “Pelangi”, Mbak Nanik Wijayanti, Indah Rahayu Kurniasari, Hanifa Tsany Hasna, Arvia Ayunthara, Ani Nurlaili, Irma Rohmawati, Handayani, Wahyudin, Danang Faizal Furqon, dan Irhamni.
8. Sahabat KKN 072 Lutfia Ayu, Asih Retnowati, Nophela Prahardika, Chochon Virginia, Nira Nirong, Abikhap, Mar Pras, Nurul Marlindut, Sara Wulandari.
9. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi (HMPE) yang telah banyak sekali memberikan ilmu dan pengalaman berharga untuk berkembang menjadi manusia dewasa yang lebih tangguh.
10. Teman-teman enumerator Bank Indonesia, Mbak Henie Susilowati, Ikhsan Dwi Anggoro, Alfi, Hesty, Satrio, Dyah, Ruli, Ayu, Ali, Yoko, dll.
11. Teman-teman kos DG Samirono Baru, Meta Asri Saraswati, Nimas Maftuhatul Firdausa, Miranti Nirmala, Ani Kusniawati, Ririn Andriyani, dll.

Serta semua pihak yang telah berjasa tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga bantuan baik yang bersifat moral maupun material selama penelitian hingga terselesainya penulisan skripsi ini dapat menjadi amal baik dan ibadah, serta mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Mei 2015

Penulis



Riska Dwi Astuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Deskripsi Teori.....	11
B. Penelitian yang Relevan.....	28
C. Kerangka Berpikir.....	29
D. Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian.....	32
B. Variabel Penelitian	32
C. Definisi Operasional.....	33

D. Tempat dan Waktu Penelitian	34
E. Data dan Jenis Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta.....	44
B. Deskripsi Data Penelitian	52
C. Analisis Data	53
D. Hasil Uji Signifikansi	58
E. Pembahasan Hasil Penelitian	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Keterbatasan Penelitian	69
C. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian yang Relevan.....	28
2. Komposisi Penggunaan Lahan.....	46
3. Statistik Deskriptif	52
4. Kriteria Pengujian DW	54
5. Hasil Uji Chow	56
6. Hasil Uji Hausman	57
7. Hasil Estimasi Model	57
8. Distribusi Persentase PDRB Prov. DIY Tahun 2005-2013	62
9. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Umur	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kurva Kuznets.....	12
2. Kurva Lorenz	14
3. Bagan Kerangka Berpikir.....	30
4. Persentase Luas Wilayah Menurut Kabupaten/kota	43
5. Perkembangan IPM di DIY Tahun 2005-2013	48
6. PDRB per Kapita DIY tahun 2005-2013.....	49
7. Populasi Penduduk DIY Periode 2005-2013	51
8. Hasil Uji Normalitas	54
9. Rata-rata Distribusi Persentase PDRB DIY tahun 2005-2013.....	62
10. Perbandingan Distribusi Usia Penduduk Tahun 2005-2013.....	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru...” (Lincoln Arsyad, 1999: 108). Pemerintah daerah terus mengupayakan pembangunan ekonomi daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya pemerintah, seluruh komponen masyarakat juga perlu terlibat dalam proses ini. Sehingga terjadi interaksi yang menghasilkan kegiatan ekonomi dan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai proses, yang artinya terjadi secara kontinyu dan berlangsung dalam jangka panjang.

Selain pembangunan ekonomi daerah, dikenal pula pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya kenaikan *output* per kapita masyarakat dalam jangka waktu panjang (Boediono: 2005). Sedangkan menurut Arsyad, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai “kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak” (Lincoln Arsyad, 2010: 12).

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki kaitan yang sangat erat. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Menurut Sadono Sukirno, salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri (Sadono Sukirno: 2004). Dalam lingkup negara, pertumbuhan ekonomi provinsi satu dengan provinsi lain biasanya memiliki laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki karakteristik masing-masing. Menurut pandangan ekonom klasik dan neo-klasik, pada dasarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan (Sadono Sukirno: 2004).

Berdasarkan data BPS tahun 2013, beberapa provinsi di Indonesia mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari tahun ke tahun. Akan tetapi di beberapa provinsi yang lain laju pertumbuhan ekonominya masih relatif rendah. Angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Papua yaitu sebesar 14,84%. Sedangkan pertumbuhan paling rendah diperoleh Kalimantan Timur yaitu sebesar 4,09%. Pada tahun sama, DIY menempati nomor dua terbawah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% (BPS: 2013).

Dalam pembangunan ekonomi daerah, di samping laju pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang harus diperhatikan adalah masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika suatu daerah meraih angka pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi distribusi pendapatannya tidak merata, maka angka pertumbuhan tersebut

menjadi bias. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan angka ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks Gini.

Indeks Gini menghitung ketimpangan dengan membuat klasifikasi 10 tingkatan pendapatan dalam masyarakat. Sepuluh tingkat golongan tersebut dihubungkan dengan 10 golongan penerima pendapatan tersebut. Sehingga akan terlihat bagaimana total pendapatan dalam masyarakat terdistribusikan. Indeks Gini berkisar dari angka 0 (kemerataan sempurna) sampai angka 1 (ketidakmerataan sempurna). Apabila indeks Gini telah mencapai angka 0,4 maka dapat dikatakan ketimpangan wilayah tersebut tergolong parah. Persentase pertumbuhan ekonomi merefleksikan persentase kenaikan pendapatan perkapita masyarakat. Apabila suatu daerah memiliki angka pertumbuhan tinggi akan tetapi angka ketimpangan distribusi pendapatan juga tinggi, berarti sebagian besar dari PDRB merupakan kontribusi dari sebagian kecil masyarakat. Pada tahun 1995, Simon Kuznets telah meneliti pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan. Menggunakan data beberapa negara maju secara *time series*, disimpulkan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan yang naik seiring naiknya pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pada suatu titik, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. sehingga pola hubungan ini akan membentuk kurva U-terbalik.

Ketimpangan yang terjadi di Indonesia termasuk kategori tinggi. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2011-2013 tercatat indeks Gini Indonesia mencapai angka

>0,4. Bahkan pada tahun 2010, 5 provinsi telah melebihi 0,4 sedangkan indeks Gini nasional kurang dari 0,4. Provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Banten, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua (BPS: 2013).

DIY pada tahun 2013 merupakan provinsi dengan *Gini ratio* tertinggi kedua di Indonesia dan tertinggi di Pulau Jawa. Sebaliknya, laju pertumbuhan ekonomi daerah untuk DIY menempati ranking terbawah di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Kasus ketimpangan yang terjadi di DIY menjadi menarik untuk diteliti, karena DIY tergolong provinsi yang pertumbuhannya relatif kecil akan tetapi angka ketimpangannya tinggi.

Masalah ketimpangan merupakan masalah yang mendesak untuk dicari solusinya. Untuk mengatasi suatu masalah, tentu harus tahu penyebabnya terlebih dahulu. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sub-Sahara Afrika adalah pertumbuhan penduduk (Simon Fulgsang: 2013). Pertumbuhan penduduk berasal dari angka kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Migrasi penduduk ke dalam akan menyebabkan ketimpangan akibat menurunnya pendapatan per kapita. Hal ini terjadi apabila penambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan aktivitas ekonomi. Meningkatnya angka kelahiran, selain mengurangi pendapatan per kapita juga akan menambah angka rasio ketergantungan penduduk. Hal ini disebabkan adanya penambahan usia non-produktif.

Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam (SDA) juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam penelitian yang

dilakukan oleh Zlatko Nikoloski, ketergantungan terhadap sumber daya alam menyebabkan tingginya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (Zlatko Nikoloski: 2009). Penelitian serupa oleh Simon Fuglsang yang menyatakan bahwa sumber daya alam berpengaruh positif pada ketimpangan distribusi pendapatan di Sub-Saharan Africa (Simon Fulgsang: 2013). Keberlimpahan sumber daya alam berpotensi besar dalam mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, faktor kepemilikan dari sumber daya alam menjadi pertanyaan apakah gap bagian uang antara pemilik lahan dan pekerjanya telah adil. Selain itu, ketergantungan terhadap sumber daya alam secara tidak langsung memperlambat perkembangan sektor industri. Perbedaan tingkat upah pekerja di sektor industri dan sektor pertanian atau yang berkaitan dengan alam inilah yang dapat mempengaruhi ukuran ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat.

Selain itu, faktor kualitas sumber daya manusia juga mempengaruhi besar kecilnya ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jonna P. Estudillo menyatakan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pilipina (Jonna P. Estudillo: 1997). Di sub-Saharan Afrika, tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas signifikan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (Simon Fulgsang: 2013). Penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah oleh Annisa Ganis, menggunakan variabel APK untuk mengukur kualitas SDM (Annisa Ganis Damarjati: 2010). Sedangkan pada penelitian Sara Purnasihar, menggunakan variabel IPM, hasilnya IPM berpengaruh

positif signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia (Sara Purnasihar: 2012).

Perubahan tingkat kemakmuran dari waktu ke waktu dapat pula menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat kemakmuran masyarakat dilihat dari capaian PDRB per kapita wilayah yang bersangkutan (BPS: 2009). Pada penelitian Simon Fuglsang, peningkatan PDB per kapita menyebabkan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara miskin Sub-Saharan Afrika. Akan tetapi, semakin negara tersebut berkembang, efek tersebut semakin menghilang.

Faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan daerah satu dengan daerah lain tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan analisis determinan ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadi perbedaan capaian laju pertumbuhan ekonomi daerah antar provinsi di Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan angka ketimpangan yang tinggi pula, maka hasil pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.

3. Provinsi-provinsi di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda.
4. DIY merupakan provinsi dengan angka ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi kedua di Indonesia dan tertinggi di pulau Jawa pada tahun 2013.
5. DIY mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
6. Pemanfaatan kekayaan SDA, kualitas sumber daya manusia, tingkat kemakmuran serta populasi penduduk dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, dimana setiap daerah memiliki permasalahan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan faktor yang mempengaruhinya berbeda-beda, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti supaya lebih fokus. Penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisis determinan ketimpangan distribusi pendapatan di DIY dengan melibatkan data seluruh kabupaten/kota di DIY. Periode tahun yang dianalisis yaitu dari 2005-2013. Terutama untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, penelitian ini difokuskan pada analisis dengan melibatkan empat variabel bebas dari sisi ekonomi dan non-ekonomi. Empat variabel tersebut adalah 1) SDA, 2) IPM, 3) PDRB per kapita, 4) Populasi Penduduk. Adapun indikator

masing-masing variabel secara berurutan adalah sebagai berikut: pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah, kualitas sumber daya manusia, tingkat kemakmuran daerah dan jumlah populasi dari daerah tersebut. Variabel SDA dinilai dengan kontribusi sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB. IPM merupakan representasi dari tingkat kualitas hidup sumber daya manusia. Variabel PDRB per kapita digunakan sebagai ukuran rata-rata kemakmuran masyarakat sekaligus aktivitas perekonomian di DIY.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh SDA terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY?
3. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY?
4. Bagaimana pengaruh populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY?
5. Bagaimana pengaruh SDA, IPM, PDRB per kapita dan populasi penduduk secara bersamaan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh SDA terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.
2. Mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.
3. Mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.
4. Mengetahui pengaruh populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.
5. Mengetahui pengaruh SDA, IPM, populasi penduduk, dan PDRB per kapita secara bersamaan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan yaitu mengenai analisis determinan ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di daerah.

b) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah ekonomi terkait dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

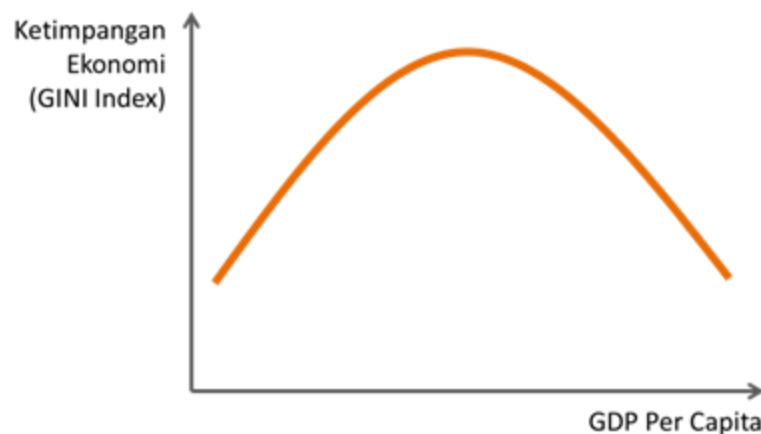
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki kaitan yang sangat erat. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri (Sadono Sukirno: 2004). Dalam lingkup negara, pertumbuhan ekonomi provinsi satu dengan provinsi lain biasanya memiliki laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki karakteristik masing-masing.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak mudah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sekaligus dengan pemerataan pendapatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar wilayah di Indonesia masih mengalami tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi. Realita yang terjadi adalah ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Masalah ketimpangan menjadi sangat penting untuk segera diatasi, mengingat tujuan

utama pembangunan ekonomi adalah untuk kesejahteraan rakyat bersama, bukan hanya sebagian rakyat.

2. Hipotesis Kuznetss

Pada tahun 1995, Simon Kuznetss telah meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di negara-negara maju. Hasil pengolahan data *time series* ini menunjukkan adanya pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan. Tahap awal pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan memburuknya distribusi pendapatan. Hal ini terus terjadi sampai pada suatu titik dimana pertumbuhan ekonomi diikuti dengan membaiknya distribusi pendapatan. Sehingga apabila disajikan dalam kurva, pola hubungan ini akan membentuk U-terbalik.



Gambar 1. Kurva Kuznets

3. Ketimpangan distribusi pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres. Sedangkan, pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu (BPS: 2012). Pengertian pendapatan menurut Soediyono (1992) adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat dalam waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi nasional. Faktor-faktor produksi nasional meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan kewirausahaan (*skill*). Secara umum, pendapatan diartikan sebagai sejumlah uang yang diperoleh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Pendapatan dapat berasal dari sektor formal dan non formal. Dalam penelitian ini, pendapatan diartikan sebagai penerimaan sejumlah uang oleh pelaku ekonomi, baik masyarakat maupun pemerintah.

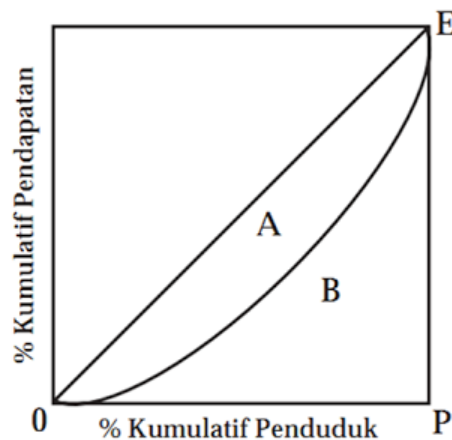
Menurut Ahluwalia (dalam Sadono Sukirno, 2006) distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu, distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak adalah presentasi jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya.

Pemerataan pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi. Pertama pembagian pendapatan antar lapisan masyarakat. Kedua, pembagian pendapatan antar daerah, yaitu daerah perkotaan dan pedesaan. Ketiga pembagian pendapatan antar wilayah, dalam hal ini antar kabupaten/kota (Dumairy: 1996).

Ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan relatif ditinjau dari pembagian pendapatan antar lapisan masyarakat di kabupaten/kota di DIY. Indikator ketimpangan yang dipakai adalah indeks Gini yang diturunkan dari kurva Lorenz.

a) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz ditemukan oleh seorang ahli statistik asal Amerika bernama Conrad Lorenz. Kurva ini tergambar dalam sebuah bujursangkar dimana sisi vertikal mewakili persentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan (Dumairy: 1996)



Gambar 2. Kurva Lorenz

Penentuan tingkat ketimpangan Kurva Lorenz dilihat dari jauh dekatnya garis lengkung terhadap garis diagonal. Semakin dekat garis lengkung dengan garis lurus diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin jauh garis lengkung terhadap diagonal, maka ketimpangan yang terjadi semakin buruk. Cara untuk menggambar kurva Lorenz dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga terbesar.
- 2) Menentukan desil pertama hingga ke sepuluh pada distribusi data.
- 3) Menghitung besarnya pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
- 4) Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
- 5) Menghitung persentase kumulatif pendapatan masing-masing desil.
- 6) Memetakan dalam plot 2 dimensi antara tiap-tiap desil sebagai sisi horizontal dan nilai persentase kumulatif pendapatan pada sisi vertikal.

Kurva Lorenz menjelaskan tingkat ketimpangan dengan menampilkan area timpang yang dibentuk oleh garis lurus dan lengkung pada kurva. Sehingga fluktuasi angka ketimpangan dari waktu ke waktu ataupun perbandingan antar tempat sulit untuk dibedakan. Ukuran secara kuantitatif akan diperjelas dengan perhitungan indeks Gini.

b) Indeks Gini

Untuk melihat angka ketimpangan distribusi pendapatan, perhitungan yang sering dipakai adalah Indeks Gini (BPS: 2013). Indeks Gini didapatkan dengan cara menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujursangkar dimana kurva Lorenz tersebut berada (Lincoln Arsyad: 2010). Secara teknis, langkah awal yaitu penduduk diurutkan dari yang mempunyai pengeluaran perkapita per bulan paling rendah sampai dengan yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan paling tinggi. Kemudian dibuat kelas-kelas setiap 10% dari paling rendah sampai paling tinggi. Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi persentase dan kumulatif persentase baik untuk penduduk penerima pendapatan maupun pendapatan yang diterima. Nilai dari indeks Gini terletak antara 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna. Berikut formula untuk mencari indeks Gini:

$$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan :

P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i

k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

Secara ringkas penghitungan indeks Gini dalam data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat kelas pengeluaran penduduk berdasarkan data Susenas.
- 2) Menghitung jumlah penduduk menurut kelompok pengeluaran.
- 3) Menghitung persentase jumlah penduduk.
- 4) Menghitung nilai pendapatan penduduk pada masing-masing kelompok.
- 5) Menentukan kumulatif pendapatan hingga kelas ke-i.
- 6) Menghitung perentase kumulatif pendapatan.
- 7) Menambahkan kumulatif pendapatan pada kelompok pengeluaran ke-i dengan kelompok pengeluaran ke-i.
- 8) Mengalikan nilai pada kolom persentase penduduk dengan kolom poin 7.
- 9) Menjumlahkan seluruh nilai pada satu kolom.
- 10) Indeks Gini diperoleh dengan mengurangi angka satu dengan nilai pendapatan pada kolom poin 9.

3. Faktor Determinan Ketimpangan distribusi pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor ekonomi yang sering dikaitkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan adalah kondisi makroekonomi suatu wilayah. Sedangkan untuk faktor non-ekonomi antara lain kondisi demografi, kondisi alam, politik, dan budaya dari wilayah yang bersangkutan (Simon Fuglsang: 2013).

Kondisi sumber daya alam akan berpengaruh terhadap bagaimana penduduk memanfaatkan potensi tersebut dan seberapa mereka bergantung pada sektor alam. Kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola segala sumber daya memiliki peran penting dalam mempengaruhi ketimpangan yang terjadi. Salah satu faktor ekonomi sebagai representasi dari tingkat kemakmuran daerah adalah capaian PDRB per kapita. Fluktuasi tingkat PDRB per kapita menunjukkan dinamika capaian kemakmuran masyarakat. Populasi penduduk dapat pula mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Populasi penduduk yang menghuni suatu wilayah tidak selalu sama setiap tahunnya. Terjadi penambahan atau penurunan sebagai akibat dari adanya kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Hal ini akan mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah tersebut.

a. Sumber Daya Alam (SDA)

Berdasarkan pendapat McKay dalam Thesis Simon Fulgsang (2013), keberlimpahan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di sub-Sahara Afrika dan Amerika Latin. Pemanfaatan SDA berpotensi memberi kontribusi besar pada pendapatan suatu negara atau daerah. Akan tetapi yang perlu diperhatikan apabila suatu daerah terus mengoptimalkan potensi alam, akan menyebabkan perkembangan sektor industri terhambat. Hal ini akan berpengaruh pada distribusi tingkat

upah. Apabila sebagian besar masyarakat terus berkuat pada pemanfaatan potensi alam, maka perbedaan tingkat upah pekerja sektor alam dan sektor lain akan semakin timpang.

Pemanfaatan sumber daya alam daerah yang dapat dinilai secara ekonomi dapat dilihat dari besaran pendapatan sektor alam terhadap PDRB. Sektor tersebut antara lain sektor pertanian dan sektor penggalian dan pertambangan. Akan tetapi untuk DIY tidak terdapat pendapatan dari sektor pertambangan.

1) Sektor pertanian.

Sektor pertanian mencakup pengusahaan dan pemanfaatan benda-benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk konsumsi sendiri atau dijual. Sektor pertanian mencakup subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Subsektor tanaman bahan makanan meliputi seluruh kegiatan yang menghasilkan komoditas bahan makanan. Subsektor tanaman perkebunan meliputi semua kegiatan yang menghasilkan komoditas tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun perusahaan perkebunan. Subsektor peternakan dan hasil-hasilnya meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh usaha

peternakan. Subsektor kehutanan mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk disini kegiatan perburuan. Subsektor perikanan mencakup kegiatan penangkapan, pembenihan, budidaya segala jenis ikan dan biota ikan lainnya, baik yang berada di air tawar maupun air asin.

2) Sektor pertambangan dan penggalian.

Kegiatan pertambangan dan penggalian adalah kegiatan yang mencakup penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, cair maupun gas. Sifat dan tujuan kegiatan tersebut yaitu menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual, atau diproses lebih lanjut. Seluruh jenis komoditas dalam sektor pertambangan dan penggalian dapat dikelompokkan ke dalam tiga subsektor, yaitu pertambangan migas, pertambangan non migas dan penggalian.

Output dari kegiatan penggalian diperoleh berdasarkan hasil perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit barang tersebut. Biaya antara diperoleh dengan mengalikn rasio biaya antara dan output. Perhitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan menggunakan metode revaluasi.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pemanfaatan sumber daya alam sangat tergantung oleh kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya alam tersebut. Menurut Aloysius (dalam Lincolin Arsyad, 2010) sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi mempengaruhi perkembangan manusia melalui tingkat pendapatan, distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Hasil dari pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas hidup manusia. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran ini melalui pencapaian rata-rata sebuah wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli. Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sara Purnasihar (2012), IPM menjadi salah satu variabel signifikan yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di Indonesia. IPM memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Apabila IPM naik, maka ketimpangan akan naik. Peningkatan IPM terjadi akibat perubahan satu atau lebih komponen IPM pada periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan besaran dari komponen IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita.

IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran ini melalui pencapaian rata-rata sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu *longevity*/umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat kelahiran, pengetahuan diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta *decent living standard*/ standar hidup layak diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Indeks tiga komponen IPM dapat dihitung dengan membuat perbandingan selisih nilai indikator penentu dan nilai minimumnya

dengan selisih penentu indikator maksimum dan minimum atau seperti formula dibawah ini :

$$\text{Indeks } X_{(i)} = [X_{(i)} - X_{(i)\min}] / [X_{(i)\max} - X_{(i)\min}]$$

Keterangan :

$X_{(i)}$ = Indikator ke-i (I=1,2,3)

$X_{(i)\min}$ = nilai minimum $X_{(i)}$

$X_{(i)\max}$ = nilai maksimum $X_{(i)}$

Kisaran antara nilai minimum dan maksimum untuk indikator yang tercakup sebagai komponen IPM adalah :

- 1) Harapan hidup kelahiran : 25 – 85
- 2) Tingkat melek huruf : 0 – 100
- 3) Rata-rata lama sekolah : 0 – 100
- 4) Konsumsi per kapita yang disesuaikan : 300.000 – 732.720

Berdasar prosedur di atas, IPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPM} = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

Keterangan :

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup kelahiran.

$X_{(2)}$: Indeks pendidikan.

{ 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah) }

$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak / paritas daya beli.

IPM mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0-1. Nol sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah dan satu sebagai tingkatan pembangunan manusia yang tertinggi (Mudrajad Kuncoro: 2012). Perkembangan IPM di Indonesia secara umum terus mengalami peningkatan (BPS: 2013). Hal ini terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM pada periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran dari komponen IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita.

c. Populasi Penduduk

Populasi penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah tertentu. Peningkatan populasi tanpa diimbangi dengan peningkatan aktivitas ekonomi akan menyebabkan perekonomian menurun. Beban ekonomi tiap keluarga menjadi bervariasi. Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah standar. Hal ini lah berdampak pada semakin tingginya angka ketimpangan.

Salah satu faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di Sub-Saharan Afrika adalah peningkatan populasi penduduk (Simon Fulgsang: 2013). Pertambahan penduduk berasal dari angka kelahiran dan migrasi

penduduk ke dalam. Idealnya, penambahan jumlah penduduk diimbangi dengan penambahan aktivitas ekonomi. Migrasi penduduk ke dalam akan menambah persaingan dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Meningkatnya angka kelahiran, selain mengurangi pendapatan per kapita juga akan menambah angka rasio ketergantungan penduduk. Hal ini disebabkan adanya penambahan usia non-produktif.

d. PDRB dan PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Masyarakat dipandang mengalami peningkatan kemakmuran apabila pendapatan perkapita menurut harga konstan atau pendapatan perkapita riil menerus bertambah.

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan PDRB disumbang oleh sembilan faktor, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS: 2014).

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga yang berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga tetap pada satu tahun tertentu sebagai dasar/referensi.

Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan, yaitu : pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Metode tak langsung biasa digunakan jika data yang diperlukan untuk menghitung PDRB tidak tersedia.

Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil (tidak ada pengaruh harga). Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu : revaluasi, ekstrapolasi, deflasi dan deflasi berganda. Menurut BPS, kegunaan PDRB dan PDRB per kapita adalah :

- 1) PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

- 2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, setiap sektor atau komponen penggunaan dari tahun ke tahun.
- 3) PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- 4) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Kenaikkan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2000. Yaitu PDRB per kapita hasil bagi dari PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga tetap pada satu tahun tertentu sebagai dasar/referensi terhadap jumlah penduduk.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 1. Penelitian yang Relevan

No	Judul dan Penulis	Model	Alat Analisis	Hasil
1.	Economic and Political Determinants of Income Inequality (Zlatko Nikoloski)	$1Gini = 1Gini(t-1) +$ Democracy + Ores Metal Exports + Oli and Gas Production + Log GDP per capita + Log of GDP per capita squared + Industry Value Added + GDP growth + Credit to Private Sector + Trade Openness + Government Expenditure + Size of the Country + error term	GMM	Semua variabel signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kecuali variabel demokrasi. Sedangkan untuk GDP per kapita berpengaruh positif pada jangka pendek dan negatif pada jangka panjang.
2.	Determinants of Income Inequality : Sub Saharan Perspective (Simon Fulgsang)	$Gini_net_{it} = \beta_0 +$ $\beta_1 loggdpcap_{it} +$ $\beta_2 loggdpcapsqr_{it} + \beta_3 Inf_{it}$ $+ \beta_4 Hiperinf_{it} + \beta_5 Trade_{it} +$ $\beta_6 Priceinv_{it} + \beta_7 Popgr_{it} +$ $\beta_8 Rurpop_{it} + \beta_9 Govexp_{it} +$ $\beta_{10} TD_t + a_i + \varepsilon_{it}$	Regresi Data Panel (Random Effect)	Inflasi, Pertumbuhan penduduk perkotaan berpengaruh negatif. Sedangkan, hyperinflasi, investasi, industrialisasi dan pertumbuhan populasi berpengaruh positif.
3.	Income Inequality in the Philippines 1961-91 (Jonna P. Estudillo)	(Kualitatif deskriptif)	Analisis <i>FIES</i>	Proporsi penduduk perkotaan, perubahan distribusi umur, pendidikan kepala keluarga dan tingkat upah berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

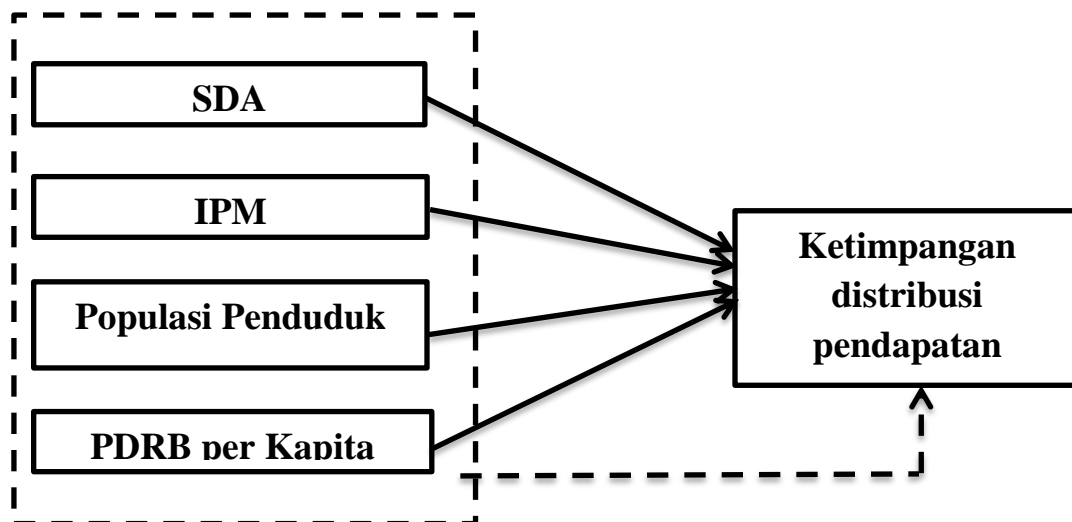
C. Kerangka Berpikir

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya menilai pertambahan pendapatan tanpa memerhatikan pemerataan distribusinya. Sehingga bisa jadi suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak mengalami pembangunan ekonomi. Sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi akan tetapi diikuti angka ketimpangan yang tinggi pula. Akan tetapi DIY mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah disertai ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi. Angka tersebut ditunjukkan dengan *Gini ratio* > 0,4. Bahkan, *Gini ratio* untuk DIY merupakan tertinggi di Pulau Jawa pada 2013 dan tertinggi kedua nasional setelah Provinsi Papua.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan DIY dengan menguji empat variabel. Empat variabel tersebut dipilih dengan pertimbangan landasan teori dari pendapat beberapa ahli serta dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan analisis penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel pertama yaitu kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi pendapatan di DIY. Kekayaan SDA meliputi pertanian, perkebunan dan penggalian. Komponen untuk menghitung kekayaan SDA diambil dari kontribusi sektor pertanian dan sektor penggalian dan pertambangan pada PDRB. Hal ini dianalisis dengan tujuan untuk

mengetahui apakah pemanfaatan SDA menjadikan masyarakat tergantung pada alam atau tidak. Sehingga efek yang mungkin muncul adalah menghambat perkembangan industrialisasi dan perkembangan sektor-sektor yang lain. Variable kedua yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas sumber daya manusia. Komponen dari IPM sendiri adalah angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan paritas daya beli. Sehingga, akan dianalisis apakah peningkatan kualitas penduduk dapat mengurangi ketimpangan ataukah sebaliknya. Variabel ketiga yaitu PDRB per kapita. Variabel ini bertujuan untuk menunjukkan rata-rata tingkat kemakmuran penduduk serta aktivitas perekonomian dari masing-masing penduduk. Variabel keempat yaitu populasi penduduk. Populasi penduduk memiliki *trend* yang meningkat dari tahun ke tahun.

2. Bagan Kerangka Berpikir



Gambar 3. Bagan Kerangka berpikir

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang ada, berikut hipotesis yang akan diuji kebenarannya :

1. SDA berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.
2. IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.
3. PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.
4. Populasi penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.
5. SDA, IPM, PDRB per kapita dan populasi penduduk secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan jenis data, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang mencari pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono: 2012). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas yaitu variabel yang menjadi penyebab perubahan dari variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Alam (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), PDRB per kapita (X3), dan Populasi Penduduk (X4).
2. Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Simbol dari variabel terikat yaitu Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang direpresentasikan oleh indeks Gini.

C. Definisi Operasional

1. Ketimpangan distribusi pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan kondisi dimana pendapatan tidak terdistribusi secara merata antar lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan relatif ditinjau dari pembagian pendapatan antar lapisan masyarakat di kabupaten/kota di DIY. Dalam penelitian ini ukuran angka ketimpangan distribusi pendapatan ditunjukkan dengan Indeks Gini.

2. Sumber Daya Alam (SDA)

SDA merupakan variabel yang merepresentasikan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam daerah. Pemanfaatan kekayaan SDA ditunjukkan oleh pendapatan daerah dari hasil pertanian dan penggalian. Angka-angka tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB.

3. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam penelitian ini menunjukan suatu ukuran kualitas hidup manusia yang diakui secara internasional. Komponen untuk menghitung IPM antara lain : angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita. Data mengenai IPM dapat diperoleh di Badan Pusat Statistik Provinsi DIY.

4. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan representasi tingkat kemakmuran dan aktivitas perekonomian masyarakat. PDRB per kapita diperoleh dari pembagian antara pendapatan domestik regional bruto pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di wilayah yang bersangkutan.

5. Populasi Penduduk

Populasi penduduk menunjukkan jumlah keseluruhan penduduk yang menghuni di DIY pada tahun dilakukan survei. Populasi pada penelitian ini mengacu pada jumlah penduduk hasil proyeksi berdasar sensus penduduk tahun 2000, sensus penduduk tahun 2010 dan hasil proyeksi berdasar sensus penduduk tahun 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DIY. Waktu penelitian pada bulan Maret tahun 2015.

E. Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu penggabungan dari data silang tempat (*cross section*) dan data deret waktu (*time series*) dari tahun 2005-2013. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Indeks Gini semua kabupaten/kota di DIY pada tahun 2005-2013

2. PDRB atas dasar harga konstan 2000 Kabupaten/Kota di DIY pada periode tahun 2005-2013
3. PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 Kabupaten/Kota di DIY pada periode tahun 2005-2013
4. Proyeksi penduduk berdasar hasil sensus penduduk tahun 2000 di masing-masing kabupaten/kota di DIY tahun 2005-2009
5. Jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 di masing-masing kabupaten/kota di DIY
6. Proyeksi penduduk berdasar hasil sensus penduduk tahun 2010 di masing-masing kabupaten/kota di DIY tahun 2011-2013
7. Indeks Pembangunan Manusia masing-masing Kabupaten/Kota di DIY tahun 2005-2013

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mempermudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan penting mengenai peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertentu seperti majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan maupun gambar atau karya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai angka PDRB menurut lapangan usaha untuk Provinsi DIY maupun kabupaten/kota yang berada di DIY, IPM, serta jumlah penduduk.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel, yaitu penggabungan *cross section* dan *time series*. Data *cross section* adalah data observasi pada beberapa subjek penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun. Sedangkan Data *time series* adalah data observasi pada satu subjek penelitian diamati dalam satu periode waktu, misalnya selama sembilan tahun. Dalam data panel, observasi dilakukan pada beberapa subjek dianalisis dari waktu ke waktu. Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* ditunjukkan oleh :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

Di mana “N” merupakan jumlah data *cross setion*. Sedangkan persamaan model dengan *time series* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

Di mana “T” merupakan jumlah data *time series*. Sehingga persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dalam model tersebut, Y merupakan variabel terikat sedangkan X merupakan variabel bebas. N menunjukkan banyaknya observasi sedangkan T menunjukkan banyaknya waktu yang dianalisis. Sehingga variabel-variabel dalam penelitian ini diaplikasikan dalam sebuah model sebagai berikut :

$$\text{Gini} = \beta_0 + \beta_1 \text{SDA}_{it} + \beta_2 \text{IPM}_{it} + \beta_3 \text{PDRBkpt}_{it} + \beta_4 \text{Pop}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Gini	= Indeks Gini
SDA	= Pemanfaatan sumber daya alam
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
PDRB perkap	= PDRB perkapita
Pop	= Populasi Penduduk
ε	= error term

“i” menunjukkan subjek ke-i, sedangkan “t” menunjukkan tahun ke-t.

Beberapa kelebihan data panel menurut Gujarati :

1. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas dalam setiap unit secara eksplisit dengan memberikan variabel spesifik subjek.
2. Penggabungan observasi *time series* dan *cross section* memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antarvariabel, lebih banyak *degree of freedom* dan lebih efisien.
3. Dengan mempelajari observasi *cross section* berulang-ulang, data panel sangat cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.

4. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data *time series* murni atau *cross section* murni.

Dalam regresi data panel terdapat empat model yang dapat digunakan. Model tersebut antara lain: model OLS *pooled*, model *fixed effects least square dummy variabel* (LSDV), *model fixed effects within-group* dan model *random effect* (Gujarati: 2013). Pemilihan model yang akan dipakai, diseleksi dengan uji spesifikasi model. Terdapat dua uji spesifikasi yaitu efek tetap (*fixed effects*) atau efek random (*random effect*).

1. Uji Spesifikasi Model

a) Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow

Uji spesifikasi bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *common effect* yang sebaiknya dipakai.

$$H_0 : \text{Common Effect}$$

$$H_a : \text{Fixed Effect}$$

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Ketika model yang terpilih

adalah *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *fixed effect model (FEM)* atau *random effect model (REM)*.

b) Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausmann

Uji ini bertujuan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *fixed effect model (FEM)* atau *random effect model (REM)*. Dalam FEM setiap obyek memiliki intersep yang berbeda-beda, akan tetapi intersep masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan *time-invariant*. Sedangkan dalam REM, intersep (bersama) mewakili nilai rata-rata dari semua intersep (*cross section*) dan komponen ε_i mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati : 2013). Hipotesis dalam uji Hausmann sebagai berikut :

Ho : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Jika hipotesis 0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai FEM. Karena REM kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas. Sebaliknya, apabila H_a ditolak, maka model yang sebaiknya dipakai adalah REM.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan Jarque-Bera test atau J-B test yaitu apabila probabilitas $>5\%$, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Apabila variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortugal. Variabel tidak ortugal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual antar pengamatan tetap, maka kondisi ini disebut homoskedastis. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut heteroskedastis. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastis. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastis adalah

dengan *me-regress* model dengan log residu kuadrat sebagai variabel terikat.

Ho : homoskedastis

Ha : heteroskedastis

Apabila, probabilitas dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05 maka terjadi penerimaan terhadap *Ho*. Sehingga tidak terdapat heteroskedastis pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homoskedastis.

3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (untuk data *times serie*) atau ruang (data *cross-section*). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*. Kriteria dari uji DW sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_l < d < d_u$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_u < d < 4d_l$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber : Damodar Gujarati, *Basic Econometrics*

3. Uji Signifikansi

1) Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai $prob F < \text{taraf sig } 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2) Uji Parsial (t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas t hitung, ketika $prob < \text{taraf sig } 5\%$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat.

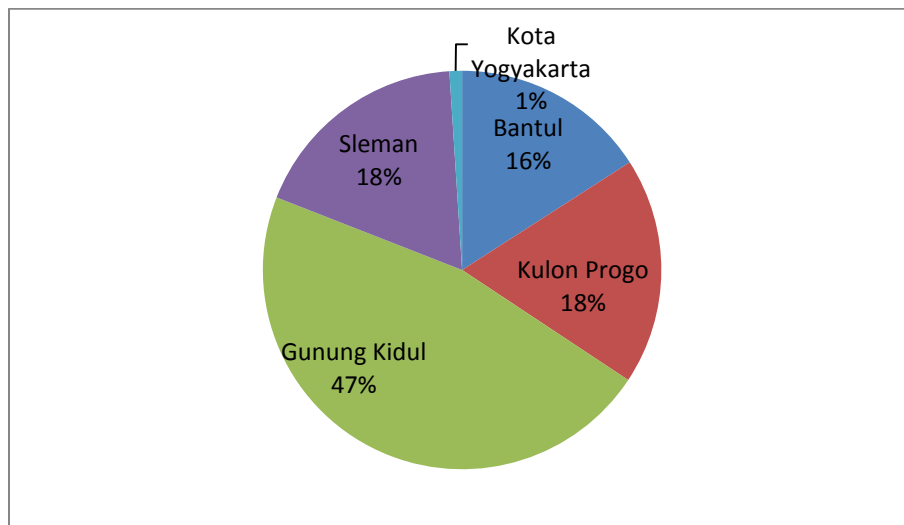
3) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai dari R^2 berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang dibuat dan sebaliknya.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah setingkat provinsi yang memiliki luas wilayah administrasi terkecil kedua di Indonesia, setelah DKI Jakarta. Luas wilayah DIY mencapai 3.185,80 km², atau 0,17% dari seluruh wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (BPS: 2014). Adapun luas wilayah masing-masing kabupaten di DIY dapat dilihat pada diagram di bawah :



Gambar 4. Persentase Luas Wilayah Menurut Kabupaten/kota

Dapat dilihat dari diagram diatas Gunungkidul merupakan kabupaten terluas di DIY. Hampir setengah dari total luas DIY adalah wilayah kabupaten Gunungkidul. Di posisi kedua ada kabupaten Sleman dan Kulonprogo dengan

luas yang hampir sama. Wilayah paling kecil yaitu kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi.

Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat jumlah penduduk yang tinggal di wilayah DIY mencapai 3.457.491 jiwa, dengan komposisi 49,43% laki-laki dan 50,57% perempuan yang tersebar di lima kabupaten/kota (BPS: 2014). Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama tahun 2000-2010 terjadi peningkatan lebih tinggi dibandingkan dekade sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan menurunnya angka kematian, meningkatnya angka harapan hidup dan semakin bertambahnya migrasi masuk ke DIY dengan tujuan bersekolah maupun bekerja (BPS: 2014).

DIY berada pada peringkat ke-3 nasional dalam hal kepadatan penduduk. Provinsi terpadat pertama dan kedua yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kepadatan penduduk DIY pada tahun 2010 sebesar 1.085 jiwa per km². Hal ini berarti setiap 1 km² wilayah DIY dihuni oleh 1.085 jiwa penduduk. Peningkatan kepadatan penduduk selama 2000-2010 sebanyak 106 jiwa per km².

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa (BPS: 2014). Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang dihasilkan setiap sektor menginformasikan besarnya ketegantungan daerah terhadap sektor tersebut. Selama 2005-2013 struktur perekonomian DIY masih didominasi oleh 4 sektor, yaitu : sektor jasa; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertanian; dan sektor industri pengolahan..

Pola laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2000-2013 cukup berfluktuasi. Pasca kontraksi pada 1998, secara bertahap perekonomian DIY mulai pulih. Akan tetapi perekonomian DIY sempat mengalami perlambatan akibat kenaikan harga BBM tahun 2005 dan bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006.

Adapun kondisi sumber daya alam, IPM, PDRB per kapita dan populasi penduduk di DIY sebagai berikut :

1. Kondisi Sumber Daya Alam

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, usaha yang dilakukan antara lain pemberdayaan sektor pertanian dan sektor penggalian. Sektor penggalian masuk dalam kategori pemanfaatan sumber daya alam karena hasil galian tersebut merupakan hasil alam yang terkandung dalam bumi serta diambil manfaatnya. Pada tahun 2013 pemanfaatan kedua sektor tersebut menyumbang 15,87% dari total pendapatan daerah.

Pada tahun 2008, pemerintah menggerakkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Hal ini mendorong pertumbuhan sektor pertanian hingga mencapai 5,63% pada tahun tersebut. Akan tetapi berakhirnya program P2BN, kondisi iklim yang kurang mendukung serta adanya erupsi Merapi menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian berkontraksi di tahun 2010-2011. Tahun berikutnya kondisi iklim kembali membaik sehingga pertumbuhan sektor pertanian kembali positif dan mencapai angka 4,19% pada tahun 2012.

DIY terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota madya. Dalam pengklasifikasian penggunaan lahan, BPS membagi menjadi dua kategori besar yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu sawah dan bukan sawah. Lahan sawah terdiri atas sawah irigasi, sawah tadah hujan dan lainnya. Sedangkan lahan bukan sawah terdiri dari tegal/kebun, ladang, hutan rakyat, padang penggembalaan, lahan sementara tidak diusahakan dan lainnya. Kemudian untuk lahan bukan pertanian antara lain jalan, pemukiman, perkantoran, dll. Adapun komposisi penggunaan lahan menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 2. Komposisi Penggunaan Lahan

Kabupaten/ Kota	Luas Lahan Pertanian		Luas Lahan Non-Pertanian	Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah		
Bantul	15.471	14.125	21.089	50.685
Kulonprogo	10.297	35.027	13.303	58.627
Gunungkidul	7865	117.829	22.842	148.536
Sleman	22.835	15.449	19.198	57.482
Yogyakarta	71	191	2.988	3.250
DIY	56.539	182.621	79.420	318.580

Sumber : BPS (2014)

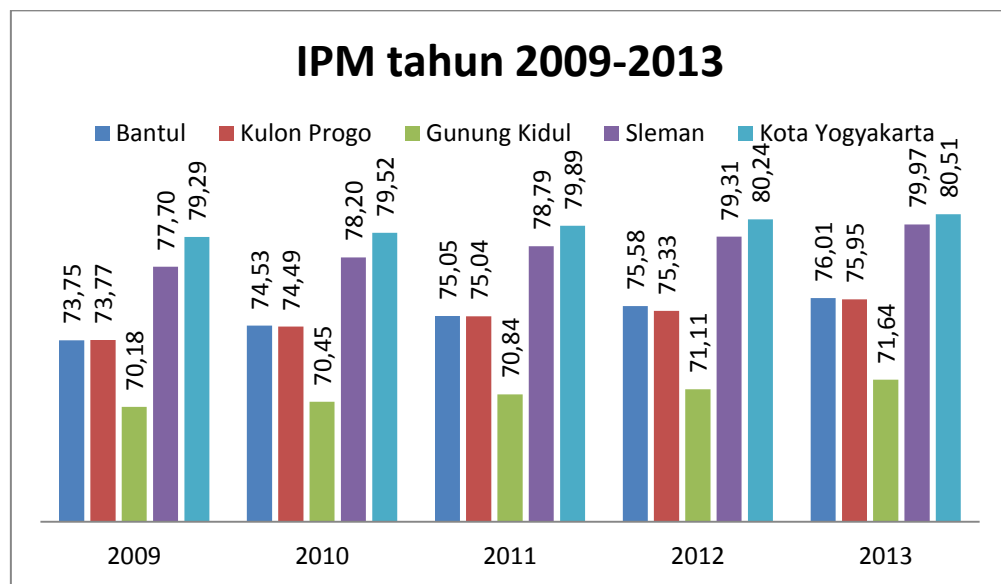
Dari data diatas diketahui bahwa 17,75% wilayah DIY terdiri atas sawah, sedangkan 57,32% lahan pertanian bukan sawah dan sisanya sebesar 24,93% lahan non-pertanian.

2. Kondisi Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran ini melalui pencapaian rata-rata sebuah wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli.

Secara nasional, IPM DIY pada tahun 2013 mencapai 77,37 dan menempati peringkat kedua tertinggi setelah DKI Jakarta dengan IPM 78,59 (BPS: 2014). Pencapaian ini merupakan peningkatan dari tahun 2012, dimana DIY berada di peringkat 4 setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Riau. Keunggulan DIY adalah, rata-rata usia harapan hidup penduduk saat lahir sebagai komponen penyusun IPM menempati urutan pertama secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk DIY secara rata-rata relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pencapaian angka melek huruf di DIY sebesar 92,86% pada tahun 2013. Pencapaian ini relatif lebih rendah dari provinsi lain. Akan tetapi untuk rata-rata lama sekolah, penduduk DIY mencapai angka 9,33 tahun berada di peringkat ke 4 setelah DKI Jakarta (11 tahun), Kepulauan Riau (9,91) dan Kaltim (9,39). Komponen IPM yang keempat yaitu paritas daya beli, penduduk DIY menempati urutan kedua secara nasional setelah penduduk provinsi Riau.

Pencapaian pembangunan manusia di semua kabupaten/kota DIY menunjukkan perkembangan yang semakin membaik selama periode 2005-2013. Secara umum, kualitas pembangunan manusia yang tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta kemudian diikuti oleh Sleman dan Bantul. Berikut ini perkembangan IPM per kabupaten/kota di DIY selama periode 2009-2013:

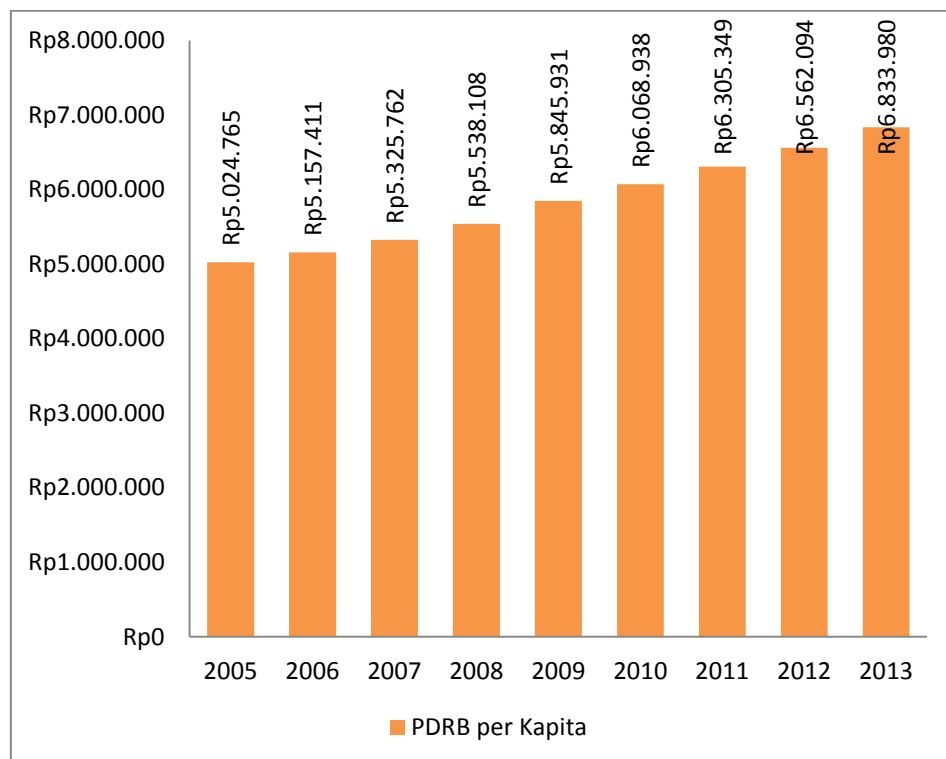


Gambar 5. Perkembangan IPM di DIY tahun 2009-2013

Dari gambar di atas sepanjang tahun 2009-2013, IPM tertinggi selalu diraih oleh penduduk Kota Yogyakarta. Rangking kedua diduduki oleh Sleman. Sedangkan IPM untuk Bantul dan Kulonprogo hampir sama besarnya sepanjang tahun tersebut. IPM terendah diperoleh oleh Gunungkidul.

3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai ukuran kesejahteraan penduduk secara kasar. PDRB per kapita dapat pula dipandang sebagai hasil aktivitas perekonomian masyarakat. Perkembangan PDRB per kapita secara riil atau dihitung atas dasar harga konstan 2000, terus mengalami kenaikan. Kecuali pada tahun 2005-2006 akibat kenaikan harga BBM dan bencana gempa bumi serta tahun 2009 akibat dampak krisis finansial di negara-negara Amerika dan Eropa. Berikut grafik perkembangan PDRB per kapita di DIY selama periode 2005-2013 :



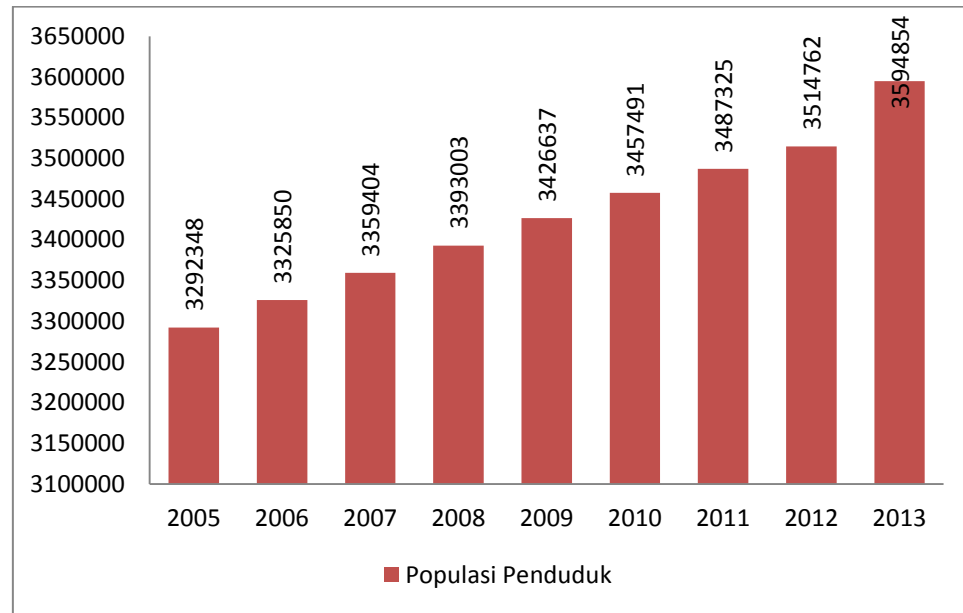
Gambar 6. PDRB per kapita DIY tahun 2005-2013

Dari grafik diatas terlihat bahwa PDRB per kapita di DIY terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan kesejahteraan penduduk DIY secara rata-rata dengan asumsi semua penduduk menerima manfaat yang sama dari hasil pertumbuhan. Selain itu, peningkatan PDRB per kapita juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian di DIY. Hal ini dikarenakan, PDRB per kapita akan meningkat apabila peningkatan PDRB lebih besar dari proporsi peningkatan jumlah penduduk.

4. Populasi Penduduk

Populasi penduduk di DIY terus mengalami peningkatan positif di setiap tahunnya, walaupun laju pertumbuhan penduduk DIY terus berfluktuasi. Pada tahun 2013 DIY dihuni oleh 3,59 juta jiwa. Hasil sensus penduduk pada tahun 1971 mencatat jumlah penduduk DIY sebanyak 2,49 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk selama periode 1971-1980 tercatat 1,10% per tahun. Angka ini mengalami penurunan pada dekade selanjutnya, menjadi 0,58% per tahun akibat keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) maupun program perbaikan taraf kesehatan masyarakat lainnya. Akan tetapi, laju pertumbuhan penduduk kembali meningkat pada rentang 2000-2010 menjadi 1,04% per tahun. Hal ini berkaitan dengan semakin menurunnya angka kematian dan meningkatnya angka harapan hidup. Selain itu, juga dipengaruhi oleh angka migrasi masuk ke DIY dengan tujuan untuk

bersekolah maupun bekerja. Berikut grafik perubahan jumlah penduduk pada tahun 2005-2013:



Gambar 7. Populasi Penduduk DIY periode 2005-2013

Apabila dicermati lebih dalam, selama 2005-2013 laju pertumbuhan penduduk di DIY tercepat terjadi di Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebaliknya, Kota Yogyakarta justru mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Sebagai wilayah pusat pemerintahan dan perekonomian, Kota Yogyakarta semakin jenuh untuk menampung penduduk akibat meningkatnya aktifitas perekonomian, pemerintahan dan sosial. Akibatnya, perkembangan kawasan pemukiman dan peningkatan jumlah penduduk di wilayah penyangganya, terutama di Kabupaten Sleman dan Bantul.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. Analisis data melibatkan satu variable terikat yaitu indeks gini pada 5 kabupaten/kota selama 9 tahun, sehingga diperoleh observasi sebanyak 45. Sedangkan untuk variabel bebasnya ada 4 (empat) yaitu sumber daya alam (SDA), indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB per kapita dan populasi penduduk. Berikut ini merupakan tabel mengenai deskripsi data dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Obs	Mean	Median	Std. Dev	Minimum	Maksimal
GINI	45	0.274351	0.2770	0.051527	0.1460	0.3579
SDA	45	743557.4	915977	453923.8	17624	1419726
IPM	45	74.96778	75.05	3.412834	69.30	80.51
PDRBPERKPT	45	6468957	4992301	3563872	3712307	16139158
POPULASI	45	685148.4	675471	274770.7	380942	1141684

Sumber : Output Eviews 6

Selama periode waktu 2005-2013, indeks gini terendah adalah 0,1460 yang dicapai oleh kota Yogyakarta pada tahun 2013. Sedangkan pada periode waktu yang sama, indeks gini tertinggi yaitu sebesar 0,3579 dicapai oleh Sleman pada tahun 2005. Hasil kekayaan sumber daya alam terbesar dicapai oleh kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 yaitu mencapai 1.419.726. Angka ini masih dalam bentuk penyederhanaan dibagi satu juta. Sehingga nilai rupiah dari hasil pemanfaatan SDA di Gunungkidul mencapai Rp 1.419.726.000.000,00. Sedangkan hasil SDA paling kecil dicapai oleh kota Yogyakarta pada tahun 2009 dengan perolehan sebesar Rp 17.624.000.000,00.

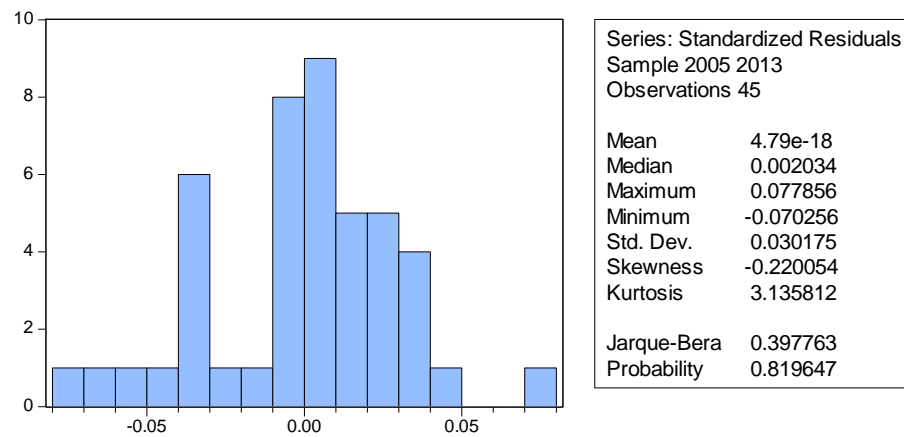
Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi diraih oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2013 dengan angka 80,51. Sedangkan IPM terendah diperoleh Gunungkidul pada tahun 2005. Besarnya pendapatan daerah regional bruto (PDRB) per kapita tertinggi diraih oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 16.139.158,00. Sedangkan PDRB per kapita terendah diraih oleh Bantul pada tahun 2005. Populasi penduduk terbanyak dicapai oleh Sleman pada tahun 2013 dengan populasi sejumlah 1.141.684. Sedangkan populasi terendah yaitu sejumlah 380.942 dicapai oleh Kulonprogo pada tahun 2005.

C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan Jarque-Bera test atau J-B test yaitu apabila nilai *probability* > 5%, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.



Gambar 8. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas di atas, probabilitas sebesar 0.819647 menunjukkan bahwa $prob > 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*. Kriteria dari uji DW sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$du < d < 4-du$

Sumber : Damodar Gujarati, *Basic Econometrics*

Dari hasil uji *DW* yang telah dilakukan, didapatkan hasil *Durbin-Watson stat* sebesar 1,723008. Sedangkan $d_L = 1.336$ dan $d_u = 1.720$. Karena nilai d hitung lebih besar dari d_u dan lebih kecil dari $4-d_u$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gangguan autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil regresi dari log residu kuadrat terhadap seluruh variabel menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat heteroskedastis dalam model tersebut.

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari masalah multikolinearitas. Dari hasil uji yang dilakukan, semua koefisien korelasi kurang dari 0,8. Maka dapat disimpulkan model tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.

2. Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel

a. Uji Chow

Pertama-tama data panel diesmitasi menggunakan efek spesifikasi fixed.

Uji yang dilakukan yaitu uji Chow. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *fixed effect* atau *common effect*.

$$H_0 : \text{Common Effect}$$

$$H_a : \text{Fixed Effect}$$

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka H_0 ditolak. Sehingga, Model menggunakan *fixed effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi *fixed* adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil tes *Rebundant Fixed Effect-Likelihood Ratio*

Effects Test	Probabilitas
Cross-section F	0.0002
Cross-section Chi-Square	0.0000

Sumber : *Output Eviews 6*

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas Chi-square sebesar 0,0000 sehingga menyebabkan H_0 ditolak. Maka model fixed adalah model yang sebaiknya digunakan.

b. *Correlated Random Effect-Hausmann Test*

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik digunakan dari *fixed effect*.

$$H_0 : \text{Random Effect}$$

$$H_a : \text{Fixed Effect}$$

Apabila hasil probabilitas chi-square lebih dari 5%, maka sebaiknya model menggunakan *random effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi random adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Probabilitas
Cross-section random	30.008866	0.0000

Sumber : Output Eviews 6

Hasil probabilitas chi-square sebesar 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model sebaiknya menggunakan *fixed effect*.

3. Analisis Data Panel

Dari uji spesifikasi di atas, maka model sebaiknya menggunakan estimasi dengan efek tetap (*fixed effect*). Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias. Hasil estimasi model regresi data panel adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Estimasi Model

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
SDA	2.11E-07	1.488865	0.1452
IPM	0.034074	2.994647	0.0049
PDRBPERKPT	-3.92E-08	-5.328045	0.0000
POPULASI	-1.31E-06	-3.830358	0.0005
C	-1.283641	-2.085438	0.0442

Sumber : Output Eviews 6

Dari hasil diatas diketahui probabilitas untuk variabel IPM, PDRBPERKPT, dan POPULASI signifikan dalam taraf error 5%. Sedangkan untuk variabel SDA memiliki probabilitas 0,1432 yang berarti bahwa variabel ini tidak signifikan.

D. Hasil Uji Signifikansi

1. Uji Simultan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *software Eviews 6*, diperoleh nilai F-hitung sebesar 8.621165 dan probabilitas F sebesar 0,000002. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel SDA, IPM, PDRB per kapita dan Populasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Uji Parsial

Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masing variabel bebas secara individu signifikan mempengaruhi variabel terikat kecuali variabel SDA.

a) Pengaruh SDA terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan di DIY

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel SDA memiliki t-hitung sebesar 1.488865 dan probabilitas sebesar 0.1452. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel SDA secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.

b) IPM

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki t-hitung sebesar 2.994647 dan probabilitas sebesar 0.0049. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel IPM secara individu signifikan dalam

mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Nilai koefisien regresi sebesar 0.034074 menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini berarti apabila IPM meningkat sebesar 1%, akan menyebabkan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.034%.

c) PDRB per kapita

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita memiliki t-hitung sebesar -5.328045 dan probabilitas sebesar 0.0000. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel PDRB per kapita secara individu signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Nilai koefisien regresi sebesar -3.00000092 menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan PDRB per kapita 1%, akan menyebabkan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 3,00000092%.

d) Populasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Populasi memiliki t-hitung sebesar -3.830358 dan probabilitas sebesar 0.0005. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel Populasi secara individu signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Nilai koefisien regresi sebesar -1.000031 menunjukkan bahwa Populasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.

Interprestasinya adalah apabila populasi naik sebesar 1% akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 1,000031 %.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* diperoleh angka sebesar 0.657043. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 65,7%. Sisanya sebesar 34,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis data panel pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SDA, IPM, PDRB per kapita dan populasi penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005-2013. Dari hasil pengolahan data panel dengan metode *fixed effect* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{GINI}_{it} = -1,283641 + 2,11\text{E} - 07 \text{ SDA}_{it} + 0,034074 \text{ IPM}_{it} - 3,92\text{E}-08$$

$$\text{PDRBkpt}_{it} - 1,31\text{E}-06 \text{ POP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

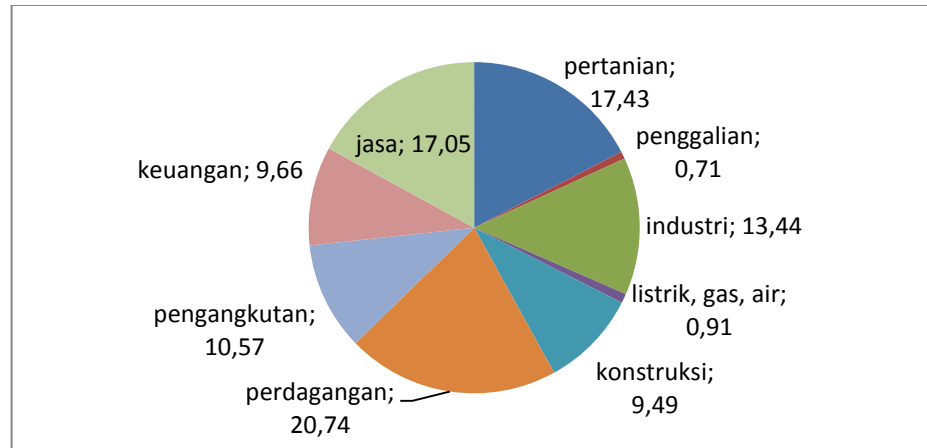
Keterangan:

Gini = Indeks Gini
 SDA = Sumber Daya Alam
 SDM = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 PDRBkpt = PDRB per kapita
 POP = Populasi Penduduk

Pada tabel 7 dan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa koefisien konstanta sebesar -1,283641. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel sistematis lain yang juga mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di DIY akan tetapi tidak masuk dalam model. Koefisien dari variabel-variabel tersebut secara akumulasi bernilai negatif. Karena tidak masuk dalam model, angka-angka sistematis tersebut masuk ke dalam konstanta. Sehingga menyebabkan koefisien konstanta menjadi negatif. Adapun variabel-variabel bebas dalam model yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dijelaskan sebagai berikut:

1. SDA

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara individu variabel SDA tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Kembali pada teori yang menyatakan bahwa sumber daya alam berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, untuk kasus DIY memiliki pola yang berbeda. Walaupun secara angka kontribusi sektor pertanian dan penggalian terus mengalami peningkatan, akan tetapi secara persentase kontribusi sektor alam terhadap PDRB mengalami fluktuasi yang cukup berarti. Selain itu, apabila dibandingkan dengan kontribusi sektor lain, sektor alam bukan merupakan kontributor terbesar bagi PDRB. Selama periode 2005-2013, kontributor terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Berikut ini diagram rata-rata distribusi persentase PDRB Provinsi DIY atas dasar harga konstan 2000 selama 2005-2013.



Gambar 9. Rata-rata distribusi persentase PDRB DIY tahun 2005-2013

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sektor pertanian ditambah dengan sektor pertambangan bukan merupakan kontributor terbesar dalam PDRB di DIY selama periode 2005-2013. Kontributor utama adalah sektor perdagangan dengan persentase sebesar 20,74%. Distribusi persentase secara rinci dari tahun 2005 sampai 2013 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 8. Distribusi Persentase PDRB Prov. DIY tahun 2005-2013

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	18,84	18,86	18,22	18,33	18,16	17,26	16,08	15,90	15,18
Penggalian	0,72	0,72	0,76	0,72	0,69	0,67	0,71	0,69	0,68
Industri	14,57	14,15	13,82	13,36	13,01	13,27	13,48	12,51	12,79
Listrik,gas,air	0,91	0,87	0,91	0,91	0,93	0,92	0,91	0,92	0,93
Konstruksi	8,25	9,01	9,47	9,57	9,59	9,70	9,89	9,95	10,01
Perdagangan	20,37	20,36	20,50	20,67	20,74	20,83	20,84	21,11	21,27
Pengangkutan	9,90	10,05	10,25	10,41	10,61	10,70	10,98	11,08	11,17
Keuangan	9,60	9,08	9,27	9,32	9,49	9,62	9,87	10,31	10,39
Jasa	16,85	16,91	16,80	16,71	16,79	17,04	17,25	17,54	17,57

Sumber : BPS (2014)

Perekonomian DIY mengalami pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga jasa. Biasanya, wilayah yang awalnya berbasis agraris bergerak ke arah basis industri. Akan tetapi tidak untuk DIY. Walaupun secara angka sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan, akan tetapi persentase kontribusinya terhadap PDRB cenderung turun. Hal ini menunjukkan ada sektor lain yang berkembang lebih pesat. Yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sepanjang 2006-2013, selain menjadi kontributor terbesar pada PDRB, sektor ini juga konsisten mengalami kenaikan. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya dan kota pariwisata. Sehingga sektor perdagangan, hotel & restoran lebih prospek untuk berkembang.

2. IPM

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IPM baik secara individu maupun simultan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Nilai koefisien regresi sebesar 0.034074 menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini berarti apabila IPM meningkat sebesar 1%, akan berpengaruh pada peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,034%. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sara

Purnasihar, IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia secara rata-rata. Komponen dari perhitungan IPM meliputi angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah serta kemampuan daya beli. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan yang tinggi pada masyarakat DIY. Hal ini akan berdampak pada rendahnya angka kematian sehingga terdapat banyak penduduk usia non-produktif. Akan tetapi usia senja biasanya tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tetapi tidak banyak. Hal ini berpotensi besar dalam meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat.

3. PDRB per kapita

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita baik secara individu maupun simultan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Nilai koefisien regresi sebesar $-3.92E-08$ menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan PDRB per kapita 1%, akan menyebabkan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 3,00000092%. DIY pada periode 2005-2013, mengalami fluktuasi yang cukup bervariasi dalam perkembangan PDRB per kapita dan indeks ketimpangan distribusi

pendapatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB per kapita mampu mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan walaupun tidak banyak. Hal ini dikarenakan, terdapat pergeseran basis ekonomi masyarakat dari agraris menuju basis perdagangan, perhotelan dan restoran. Hal ini menyebabkan kenaikan tingkat upah. Terlebih lagi, Yogyakarta yang menyandang sebagai kota pariwisata tak pernah sepi dari pengunjung terutama di musim liburan. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat DIY.

4. Populasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Populasi baik secara individu maupun simultan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Nilai koefisien regresi sebesar $-1.31E-06$ menunjukkan bahwa populasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini berarti apabila populasi meningkat sebesar 1%, akan menyebabkan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 1,000031%. Hal ini disebabkan karena pergeseran distribusi usia penduduk. Hal ini terlihat pada piramida penduduk DIY dimana komposisi penduduk berdasar usia didominasi oleh kelompok usia produktif. Disamping itu migrasi masuk ke DIY bertambah setiap tahunnya, baik untuk kepentingan belajar/sekolah maupun bekerja. Artinya bahwa, peningkatan penduduk banyak terjadi pada kelompok usia

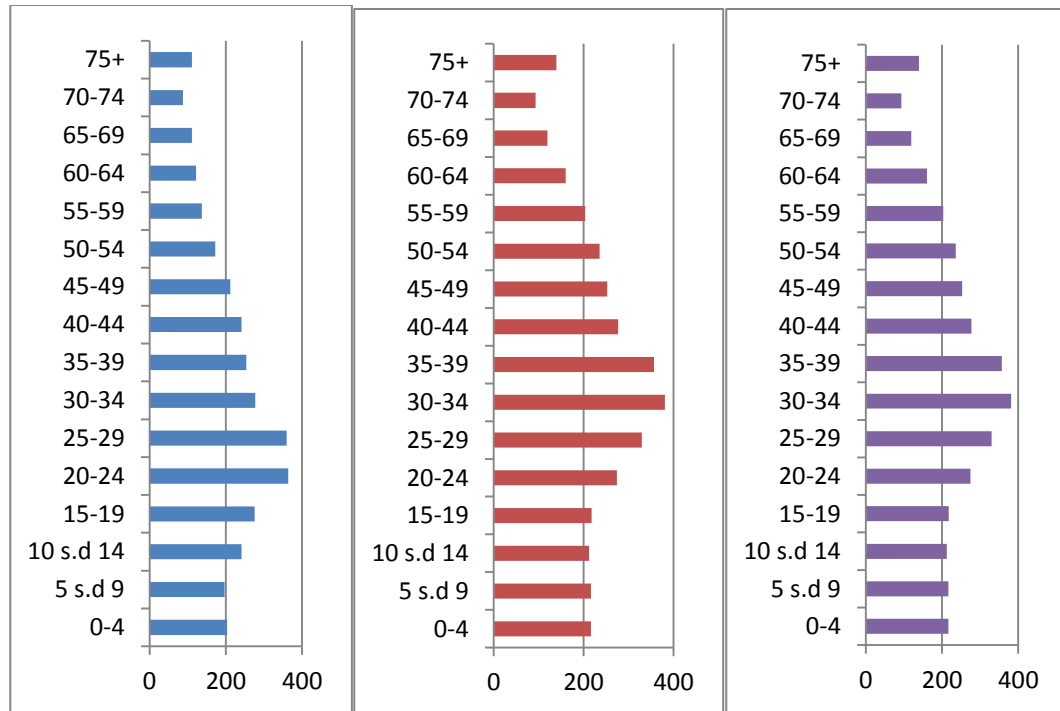
produktif. Berikut ini tabel serta perkembangan proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok umur di DIY.

Tabel 9. Proyeksi jumlah penduduk menurut umur di DIY 2005-2015

Umur	2005	2010	2015
0-4	203,50	215,20	216,80
5-9	196,40	208,20	216,60
10-14	241,50	207,50	212,20
15-19	275,40	247,00	218,00
20-24	363,60	309,00	274,40
25-29	359,60	384,60	329,60
30-34	277,10	359,20	380,80
35-39	253,60	276,60	356,60
40-44	241,10	254,90	277,10
45-49	212,10	239,50	252,50
50-54	172,20	208,80	236,00
55-59	137,30	169,00	203,50
60-64	121,70	129,10	160,50
65-69	111,20	105,20	119,50
70-74	87,80	92,30	93,50
75+	111,40	128,50	139,80

Sumber : BPS (proyeksi SUPAS 2005)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pergerakan distribusi umur tidak selalu sama dengan jumlah awal penduduk di 5 tahun sebelumnya. Jika diasumsikan semua penduduk pada usia 0-4 tahun misalnya, hidup semua sampai dengan usia mereka 5-9 tahun, maka kemungkinan jumlahnya sekitar 203,5 ribu jiwa. Akan tetapi menjadi 208,2 ribu jiwa pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan adanya migrasi ke dalam DIY. Berikut ini perbandingan grafik distribusi penduduk menurut usia antara tahun 2005, 2010 dan 2015.



Gambar 10. Perbandingan distribusi usia penduduk tahun 2005, 2010 dan 2015.

Dari perbandingan tiga gambar di atas dapat kita lihat bahwa terjadi pergeseran distribusi penduduk dalam setiap 5 tahunnya. Pada tahun 2005, porsi terbesar ada pada penduduk kelompok usia 20-29. Kemudian pada tahun 2010, bergeser pada usia 30-39. Sedangkan proyeksi untuk tahun 2015 porsi terbesar masih bertahan di kelompok usia 30-39.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam daerah yang ditunjukkan dengan variabel SDA tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini dikarenakan DIY mengalami pergeseran basis ekonomi menuju sektor niaga dan jasa.
2. Kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini dikarenakan usia harapan hidup yang tinggi menyebabkan banyaknya usia non-produktif yang tinggal DIY. Sehingga memicu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.
3. Tingkat kemakmuran masyarakat yang ditunjukkan oleh variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini terkait dengan pergerakan basis ekonomi menuju basis niaga jasa sehingga terjadi peningkatan tingkat upah.
4. Jumlah penduduk ditunjukkan dengan variabel populasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.

5. Hal ini dikarenakan banyaknya mobilitas penduduk usia produktif ke DIY dengan tujuan sekolah/kuliah atau bekerja.
6. Variabel SDA, IPM, PDRB per kapita dan Populasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi besarnya ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut :

1. Periode waktu pengamatan hanya pendek, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Dengan pengamatan tahunan, sehingga jumlah *time series* yang dianalisis hanya 9 tahun.
2. Penggunaan data *cross-section* yang relatif sedikit dikarenakan jumlah kabupaten/kota di DIY hanya sejumlah 5. Sehingga jumlah observasi data panel hanya 45 observasi.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan ada banyak sekali. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya 4 variabel saja yang dianalisis.

C. Saran

Bagi Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta :

1. Turun atau naiknya pemanfaatan kekayaan alam tidak akan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Sehingga penggiatan dalam mengolah sumber daya alam tidak akan menimbulkan dampak yang berarti terhadap angka ketimpangan distribusi pendapatan. Pemerintah

dapat memperluas lapangan pekerjaan di bidang pertanian ataupun penggalian guna mengurangi angka pengangguran. Tidak harus melulu mengandalkan sektor industri ataupun niaga.

2. Walaupun angka usia harapan hidup DIY tergolong tinggi, akan tetapi masih ada komponen lain dalam membentuk IPM, yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat. Program-program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan IPM, sebaiknya ditinjau ulang apakah sudah tepat sasaran atau belum. Upaya peningkatan IPM sebaiknya difokuskan pada masyarakat dan daerah-daerah yang membutuhkan.
3. Peningkatan kemakmuran dan aktivitas ekonomi yang diukur dengan meningkatnya PDRB per kapita mampu menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sehingga, pemerintah perlu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian PDRB per kapita. Hal ini dapat ditempuh dengan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang sensitif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
4. Perpindahan penduduk ke DIY dapat memberikan dampak positif. Perpindahan ini sebagian besar dilakukan oleh kelompok usia produktif untuk bersekolah atau bekerja. Hal dapat merangsang aktivitas ekonomi yang lebih besar. Sehingga pemerintah perlu untuk mempertahankan gelar kota pelajar serta terus menjaga wibawa daerah tersebut. Selain itu,

pemerintah juga harus siap dalam menghadapi bonus demografi sehingga kelebihan usia produktif dapat diberdayakan secara optimal.

5. Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, perkembangan IPM daerah, capaian PDRB per kapita serta populasi penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Sehingga pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terkait dengan empat hal tersebut. Hal ini bertujuan supaya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi ketimpangan dapat tepat sasaran dan efektif.

Bagi Penelitian Selanjutnya :

1. Sebaiknya melibatkan variabel yang lebih bervariasi baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun budaya.
2. Untuk jumlah observasi sebaiknya ditambah, baik dari segi *cross-section* maupun *time series*-nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Ganis Damarjati. 2010. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Jawa Tengah. *Laporan Penelitian*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Boediono. 2005. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- BPS. 2014. *Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2014*. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta
- BPS. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2013*. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta
- BPS. 2012. *Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2012*. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta
- BPS. 2010. *Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2010*. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta
- BPS. 2007. *Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2006/2007*. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta
- BPS. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta : BPS Kabupaten Gunungkidul
- BPS. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman*. Yogyakarta : BPS Kabupaten Sleman
- BPS. 2010. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta
- BPS. 2013. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta
- BPS. 2011. *Rasio Gini Kabupaten Gunung Kidul*. Yogyakarta : BPS Kabupaten Gunung Kidul
- BPS. 2013. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

- BPS. 2014. *Statistik Daerah Kabupaten Bantul 2014*. Yogyakarta : BPS Kabupaten Bantul
- BPS. 2009. *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2009*. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta
- BPS. 2014. *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014*. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dedi Rosadi. 2011. *Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta.
- Doddy Ariefianto. 2012. *Ekonometrika, Esensi dan Aplikasi Menggunakan Eviews*. Jakarta : Erlangga.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Estudillo, Jonna P. 1997. Income Inequality in the Philippines 1961-91. *Jurnal The Developing Economies*, XXXV-1 (March 1997) : 68-95.
- Fulgsang, Simon. 2013. Determinants of Income Inequality : Sub-Saharan Perspective. *Thesis*. Aarhus University.
- Gujarati Damodar & Dawn Porter. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Irawan & Suparmoko. 2011. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008.
- Lincoln Arsyad. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Lincoln Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mudrajad Kuncoro. 2012. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan Yogyakarta : UPP AMP YKPN*.
- Nikoloski, Zlatko. Economic and Political Determinants if Income Inequality. *Thesis*. University College London.

- Sabda Imani Rubiarko. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur. *Abstrak Hasil Penelitian Universitas Brawijaya*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Sara Purnasihar. 2012. Analisis Ketimpanga Pendapatan Antar Wilayah & Sekitar Di Inonesia. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Soediyono. 1992. *Teori Ekonomi Mikro. Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sadono Sukirno. 2004. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : LPFE UI.
- Sadono Sukirno. 2006. *Makroekonomi : Pengantar Teori*. Jakarta : Raja Grafindo Persindo
- Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Todaro, Michael P. 1995. *Ekonomi untuk Negara Berkembang*. Jakarta : Bumi Aksara

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
DATA PENELITIAN

Tahun	kab/kota	Gini Ratio	SDA	IPM	PDRB per kapita	Populasi
2005	Bantul	0,3375	Rp 824.376	71,90	Rp 3.712.307	846.658
2006	Bantul	0,2569	Rp 848.742	71,97	Rp 3.732.268	859.729
2007	Bantul	0,3008	Rp 873.568	72,78	Rp 3.845.008	872.866
2008	Bantul	0,3200	Rp 915.977	73,38	Rp 4.083.309	866.061
2009	Bantul	0,2531	Rp 955.200	73,75	Rp 4.203.156	899.312
2010	Bantul	0,2746	Rp 969.785	74,53	Rp 4.353.170	911.503
2011	Bantul	0,3365	Rp 959.241	75,05	Rp 4.543.555	921.263
2012	Bantul	0,3429	Rp 995.289	75,58	Rp 4.741.942	927.958
2013	Bantul	0,3183	Rp 1.007.149	76,01	Rp 4.905.093	947.066
2005	KP	0,2969	Rp 416.725	71,50	Rp 3.920.799	380.942
2006	KP	0,2318	Rp 430.042	72,01	Rp 4.075.587	382.661
2007	KP	0,1802	Rp 442.408	72,76	Rp 4.239.954	384.326
2008	KP	0,2890	Rp 471.683	73,26	Rp 4.435.553	385.937
2009	KP	0,2504	Rp 493.087	73,77	Rp 4.460.215	387.493
2010	KP	0,2408	Rp 480.378	74,49	Rp 4.580.532	388.869
2011	KP	0,3365	Rp 511.071	75,04	Rp 4.790.630	390.207
2012	KP	0,3429	Rp 534.780	75,33	Rp 4.992.301	393.221
2013	KP	0,3240	Rp 546.225	75,95	Rp 5.229.102	403.203
2005	GK	0,2770	Rp 1.127.777	69,30	Rp 4.000.254	674.813
2006	GK	0,2298	Rp 1.180.264	69,43	Rp 4.141.652	675.140
2007	GK	0,2143	Rp 1.196.929	69,68	Rp 4.292.535	675.359
2008	GK	0,2529	Rp 1.256.683	70,00	Rp 4.545.405	675.471
2009	GK	0,2389	Rp 1.328.229	70,18	Rp 4.733.513	675.474
2010	GK	0,2517	Rp 1.326.552	70,45	Rp 4.930.660	675.382
2011	GK	0,3010	Rp 1.339.834	70,84	Rp 5.124.334	677.998
2012	GK	0,3234	Rp 1.394.489	71,11	Rp 5.319.628	684.740
2013	GK	0,3029	Rp 1.419.726	71,64	Rp 5.470.500	700.192
2005	Sleman	0,3579	Rp 907.030	75,60	Rp 5.082.679	996.219
2006	Sleman	0,3279	Rp 943.502	76,23	Rp 5.240.006	1.015.521
2007	Sleman	0,2758	Rp 956.420	76,70	Rp 5.408.803	1.035.032
2008	Sleman	0,3107	Rp 1.017.852	77,24	Rp 5.535.189	1.054.751
2009	Sleman	0,2944	Rp 1.033.709	77,70	Rp 5.675.733	1.074.673
2010	Sleman	0,2758	Rp 1.035.002	78,20	Rp 5.830.337	1.093.110

2011	Sleman	0,2709	Rp 1.017.108	78,79	Rp 6.054.435	1.107.304
2012	Sleman	0,2783	Rp 1.057.900	79,31	Rp 6.341.065	1.114.833
2013	Sleman	0,2530	Rp 1.073.640	79,97	Rp 6.544.629	1.141.684
2005	Kota Jogja	0,3209	Rp 22.077	77,70	Rp 10.008.919	393.716
2006	Kota Jogja	0,3184	Rp 21.621	77,81	Rp 10.269.336	392.799
2007	Kota Jogja	0,2899	Rp 19.488	78,14	Rp 10.587.919	391.821
2008	Kota Jogja	0,1768	Rp 18.398	78,95	Rp 12.848.944	390.783
2009	Kota Jogja	0,2327	Rp 17.624	79,29	Rp 13.459.207	389.685
2010	Kota Jogja	0,2174	Rp 17.727	79,52	Rp 14.167.677	388.685
2011	Kota Jogja	0,1937	Rp 18.048	79,89	Rp 14.893.159	390.553
2012	Kota Jogja	0,1793	Rp 18.235	80,24	Rp 15.612.923	394.012
2013	Kota Jogja	0,1460	Rp 18.486	80,51	Rp 16.139.158	402.709

LAMPIRAN 2 DESKRIPSI STATISTIK

Date: 05/02/15
Time: 13:45
Sample: 2005 2013

	INDEKSGINI	SDA	IPM2	PDRBPERKPT	POPULASI
Mean	0.274351	743557.4	74.96778	6468957.	685148.4
Median	0.277000	915977.0	75.05000	4992301.	675471.0
Maximum	0.357900	1419726.	80.51000	16139158	1141684.
Minimum	0.146000	17624.00	69.30000	3712307.	380942.0
Std. Dev.	0.051527	453923.8	3.412834	3563872.	274770.7
Skewness	-0.535461	-0.437869	-0.032652	1.646365	0.182639
Kurtosis	2.577113	1.924383	1.774662	4.256881	1.511160
Jarque-Bera	2.485701	3.607254	2.823219	23.29092	4.406387
Probability	0.288560	0.164700	0.243751	0.000009	0.110450
Sum	12.34580	33460085	3373.550	2.91E+08	30831676
Sum Sq. Dev.	0.116820	9.07E+12	512.4872	5.59E+14	3.32E+12
Observations	45	45	45	45	45

LAMPIRAN 3 HASIL REGRESI DATA PANEL

Dependent Variable: INDEKSGINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/02/15 Time: 12:18
 Sample: 2005 2013
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SDA	2.11E-07	1.42E-07	1.488865	0.1452
IPM2	0.034074	0.011378	2.994647	0.0049
PDRBPERKPT	-3.92E-08	7.35E-09	-5.328045	0.0000
POPULASI	-1.31E-06	3.43E-07	-3.830358	0.0005
C	-1.283641	0.615526	-2.085438	0.0442

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.657043	Mean dependent var	0.274351
Adjusted R-squared	0.580830	S.D. dependent var	0.051527
S.E. of regression	0.033360	Akaike info criterion	-3.786056
Sum squared resid	0.040064	Schwarz criterion	-3.424724
Log likelihood	94.18626	Hannan-Quinn criter.	-3.651355
F-statistic	8.621165	Durbin-Watson stat	1.723008
Prob(F-statistic)	0.000002		

LAMPIRAN 4

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: LOG(RESIDUSQUARE3)

Method: Panel Least Squares

Date: 05/02/15 Time: 12:36

Sample: 2005 2013

Periods included: 9

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SDA	-1.18E-06	2.35E-06	-0.500486	0.6195
IPM2	-0.320891	0.283868	-1.130425	0.2650
PDRBPERKPT	-2.02E-07	2.08E-07	-0.971964	0.3369
POPULASI	-1.51E-06	3.49E-06	-0.434214	0.6665
C	18.53810	19.85789	0.933538	0.3561
R-squared	0.260493	Mean dependent var	-8.740564	
Adjusted R-squared	0.186542	S.D. dependent var	2.874010	
S.E. of regression	2.592124	Akaike info criterion	4.847271	
Sum squared resid	268.7642	Schwarz criterion	5.048012	
Log likelihood	-104.0636	Hannan-Quinn criter.	4.922105	
F-statistic	3.522523	Durbin-Watson stat	2.129727	
Prob(F-statistic)	0.014857			

LAMPIRAN 5

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

	INDEKSGINI	SDA	IPM2	PDRBPERKPT	POPULASI
INDEKSGINI	1.000000	0.345985	-0.160073	-0.523819	0.363942
SDA	0.345985	1.000000	-0.583881	-0.725372	0.706567
IPM2	-0.160073	-0.583881	1.000000	0.718137	0.028942
PDRBPERKPT	-0.523819	-0.725372	0.718137	1.000000	-0.430261
POPULASI	0.363942	0.706567	0.028942	-0.430261	1.000000

LAMPIRAN 6

HASIL UJI NORMALITAS

